

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya yaitu pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan :

1. Pelaksanaan sistem pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) di Pemerintah Kabupaten Sleman sudah sesuai dalam menerapkan Prinsip Transaparansi Pengadaan Barang dan Jasa yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai penyelenggara sudah berupaya semaksimal mungkin agar pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kabupaten Sleman ini bisa meminimalisir adanya tindakan curang maupun tindakan yang berujung kejahatan yang melanggar hukum sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Kendala dari Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (*e-procurement*) di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sleman adalah kurangnya pemanfaatan sistem pengadaan oleh tim teknis OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang

menyebabkan terdapat kendala dalam hal pencatatannya yang kurang disiplin dan melakukan pengadaan secara manual atau langsung kepada penyedia tanpa melalui SPSE, karena hal tersebut bersinggungan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait dengan penyelenggara sistem elektronik, sehingga tidak menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih sesuai Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator 'Antara' Dalam Indeks Reformasi Birokrasi.

3. Upaya Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (*e-procurement*) di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sleman adalah memberikan pendampingan atau konsultasi kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik. Selain itu, terkait pencatatan manual yang *diupload* dalam SPSE sesuai dengan fungsi pengelolaan layanan secara elektronik dalam mempublikasi terkait pengadaan barang/jasa melalui media elektronik yang diatur dalam Lampiran Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2021, sehingga menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih sesuai Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021

Tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik
Sebagai Aspek Indikator ‘Antara’ Dalam Indeks Reformasi Birokrasi.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Sleman lebih mengawasi dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk mencegah terjadinya kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang telah diberikan tanggung jawab kepada setiap pihak yang terlibat wajib menjalankan kewajibannya dengan penuh integritas dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Pemerintah Kabupaten Sleman perlu membuat regulasi yang mengatur tentang pencatatan manual wajib diinput kedalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) agar penggunaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, 2016, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Agus Dwiyanto, 2014, *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Lalolo Krina P, 2003, *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Jakarta.
- Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta.
- Mustofa Didjaja, 2003, *Transparansi Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Nico Andrianto, 2007, *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e Government*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Rendra Setyadiharja, 2017, *E-Procurement (Dinamika Pengadaan Barang/Jasa Elektronik)*, Deepublish, Yogyakarta.
- Riawan Tjandra. W., 2022, *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, (Edisi Pertama), Kencana, Jakarta.
- R. Baswir, 2000, *Manajemen Keuangan Daerah*, BPFE, Yogyakarta.
- Willem Siahaya, 2013, *Manajemen Pengadaan (procurement management)*, Alfabeta, Bandung

Jurnal

Joaquim Filipe, *et.all*, 2015, "Determinants of Local Governments Transparency in Times of Crisis : Evidence From Municipality-Level Panel Data", *Administration & Society*, Vol 50/ Nomor 04/ September/2015, School of Economics and Management University of Minho Campus de Gualtar, Braga, Portugal.

Kodar Udoyono, 2012, "E-Procurement Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Di Kota Yogyakarta", *Journal of Government and Politics*, Vol. 3 Nomor 1 Februari 2012, Lembaga Pengkajian Kebijakan Publik (LPKP) Yogyakarta.

Sabrina Dyah Nayabarani, 2017, "Membangun Transparansi Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Peningkatan Peran Ict Dalam Mereduksi Korupsi", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 47/Nomor 4/Artikel 5/Juni 2017, Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.

Tesis

Cesilia Arum Septianingsih, 2022, *Analisis Perencanaan Pengadaan Dan Sistem Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintahan (Studi Kasus Pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Bagian Layanan Pengadaan Gunungkidul)*, Tesis, Program Studi Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring Dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511. Jakarta.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593. Jakarta.

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang *E-Tendering*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157. Jakarta.

Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Katalog.

Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik di Kabupaten Sleman. Berita Daerah Kabupaten Sleman Nomor 20 Tahun 2010 Seri 8. Sekretaris Daerah. Sleman.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 15.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah. Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 15.1. Sekertariat Daerah, Yogyakarta.

Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator 'Antara' Dalam Indeks Reformasi Birokrasi.

Wawancara

Tika kuswini, S. Si., Sub-Koordinator Kelompok Substansi Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Sleman, Wawancara Pribadi pada Selasa, 13 Agustus 2024.



LAMPIRAN

The screenshot shows the LPSE Kab Sleman interface for 'Pencatatan Non Tender'. The page features a navigation bar with options like BERANDA, CARI PAKET, REGULASI, KONTEN KHUSUS, DAFTAR HITAM, AMEL, and KONTAK KAMI. Below the navigation, there are tabs for 'Tender', 'Non Tender', 'Pencatatan Non Tender', 'Pencatatan Swakelola', and 'Pencatatan Pengadaan Darurat'. The main content area includes search filters for 'Jenis Pengadaan' (Semua), 'Tahun Anggaran' (Semua), and 'Nama K/L/PP/Instansi Lainnya'. A table lists the following packages:

Kode Paket	Nama Paket	K/L/PP/Instansi Lainnya	Status	Pagu
9742054	Fotocopy Pengadaan Langsung spse 4.5 Jasa Lainnya - TA 2024	Kab. Sleman	Paket Sedang Berjalan	1,6 Jt
9741054	Premi Asuransi Kesehatan Pengecualian spse 4.5 Jasa Lainnya - TA 2024	Kab. Sleman	Paket Sedang Berjalan	1,4 Jt

Footer information includes: Tentang Kami, Pakta Integritas, Persyaratan dan Ketentuan, 21 September 2024 18:34 WIB, © Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Aplikasi SPSE v4.5/20240814.

Gambar 1. Pencatatan Non Tender

Sumber : Website LPSE Kabupaten Sleman

The screenshot shows the LPSE Kab Sleman interface for 'Pencatatan Swakelola'. The page features a navigation bar with options like BERANDA, CARI PAKET, REGULASI, KONTEN KHUSUS, DAFTAR HITAM, AMEL, and KONTAK KAMI. Below the navigation, there are tabs for 'Tender', 'Non Tender', 'Pencatatan Non Tender', 'Pencatatan Swakelola', and 'Pencatatan Pengadaan Darurat'. The main content area includes search filters for 'Tipe Swakelola' (Semua), 'Tahun Anggaran' (Semua), and 'Nama K/L/PP/Instansi Lainnya'. A table lists the following packages:

Kode Paket	Nama Paket	K/L/PP/Instansi Lainnya	Status	Pagu
3658054	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Swakelola spse 4.5 TA - 2024	Kab. Sleman	Paket Sedang Berjalan	213,8 Jt
3655054	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Puskesmas Despok I Swakelola spse 4.5 TA - 2024	Kab. Sleman	Paket Sedang Berjalan	3,2 Jt

Footer information includes: Tentang Kami, Pakta Integritas, Persyaratan dan Ketentuan, 21 September 2024 18:53 WIB, © Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Aplikasi SPSE v4.5/20240814.

Gambar 2. Pencatatan Swakelola

Sumber : Website LPSE Kabupaten Sleman



Gambar 3. Dokumentasi Bersama Narasumber